

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## DPRD Beri Catatan untuk Tim Gubernur

DPRD DKI Jakarta memberikan sejumlah catatan resmi tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan. Salah satunya tentang tugas pokok dan fungsi tim yang diminta lebih terukur.

**JAKARTA, KOMPAS** — DPRD DKI Jakarta meminta adanya mekanisme evaluasi terhadap Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan. Dewan juga memberikan catatan agar Pemerintah Provinsi DKI mencegah duplikasi tugas TGUPP dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.

Catatan DPRD ini dibacakan anggota Badan Anggaran DPRD DKI, Achmad Yani, Rabu (11/12/2019), dalam rapat paripurna penandatanganan persetujuan bersama pimpinan DPRD dan gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD DKI 2020.

Dalam catatan itu, DPRD meminta anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang merangkap jabatan dan menerima penghasilan ganda dari satu sumber, yakni APBD, agar mengembalikan penghasilan yang diterima selama ini dari jabatan gandanya.

Dalam rapat di Komisi E terungkap salah satu anggota TGUPP, yakni Achmad Haryadi, juga diusulkan kembali menjabat dalam dewan pengawas rumah sakit untuk tujuh rumah sakit umum daerah DKI Jakarta. Haryadi yang menjadi anggota TGUPP sejak 2018 telah menjadi pengawas rumah sakit sejak 2016.

Selama ini, kendati dibiayai APBD DKI Jakarta, tak ada evaluasi terhadap TGUPP maupun ukuran keberhasilannya. Tim hanya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur DKI.

Anggaran TGUPP diputuskan tetap sama tanpa pemangkasan seperti usulan semula. Padahal, rapat Badan Anggaran yang digelar dua hari sebelumnya telah memutuskan jumlah anggota TGUPP dipangkas dari 67 orang menjadi 50 orang.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memangkas jumlah anggota TGUPP

menjadi 50 orang setelah perdebatan alot dalam rapat sebelumnya. Kendati telah diputuskan dipangkas, tak ada penyesuaian anggaran untuk mengikuti keputusan pemangkasan jumlah anggota tersebut. Dalam rapat itu, Prasetyo memang tak memberikan keputusan mengenai penyesuaian anggaran.

Dalam Raperda APBD yang disepakati kemarin, pos anggaran tim gubernur itu tetap Rp 19,8 miliar.

Jumlah anggaran itu awalnya diusulkan untuk 67 orang yang digaji Rp 8 juta-Rp 50 juta per bulan sesuai posisi.

"(Sisa anggaran) akan dimasukkan pada BTT (Biaya Tidak Terduga)," kata Prasetyo.

Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan, DPRD hanya merekomendasikan jumlah orang, tetapi anggarannya tidak direkomendasikan berubah.

"Mereka memberikan masukan, tentu kami akan pertimbangkan. Tetapi, nanti kami lihat kebutuhannya," katanya usai rapat paripurna.

Menurut Anies, dalam pernyataannya, DPRD DKI secara eksplisit mengakui TGUPP diperlukan untuk percepatan pembangunan dan sinkronisasi program-program. "Jadi, masukan kami perhatikan, kami hormati, nanti pelaksanaannya kami lihat kebutuhannya lagi," katanya.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Suharti mengatakan, pemotongan anggaran pos TGUPP tidak bisa serta-merta dilakukan sebab diperlukan beberapa proses sesuai aturan terlebih dahulu.

Kendati penganggaran tetap, belum tentu seluruh anggaran itu nantinya digunakan.

"Hal ini belum dibahas lebih lanjut dengan Pak Gubernur. Intinya Pak Gubernur tetap mendengarkan masukan dari dewan. Lagi pula, kan, ada yang

mengundurkan diri juga, pasti ada yang berkurang," katanya.

Terkait pembiayaan anggota TGUPP yang non-aparatur sipil negara, dalam rapat Badan Anggaran awal pekan ini, opsi sumber pembiayaan anggota TGUPP dari APBD DKI hanya didukung Fraksi Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional.

Sementara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia mengusulkan penggunaan dana operasional Gubernur DKI untuk membiayai TGUPP, seperti dilakukan oleh gubernur sebelumnya.

Penolakan penggunaan APBD DKI untuk TGUPP didasarkan karena tidak adanya parameter pencapaian kinerja serta kewenangannya dinilai terlalu besar sehingga memengaruhi kinerja satuan kerja perangkat daerah.

### Bantuan parpol

Sementara itu, penambahan pos dana bantuan partai politik dari sekitar Rp 14 miliar menjadi lebih kurang Rp 27 miliar langsung dilakukan dalam Raperda APBD DKI 2020.

Usulan kenaikan dana bantuan partai politik ini juga dibahas di hari terakhir rapat Badan Anggaran pada awal pekan ini, bersamaan dengan pembahasan anggaran TGUPP.

"Kalau ini, kan, supaya bisa dilakukan di awal tahun anggaran," kata Suharti.

Kendati terlambat dari batas Kementerian Dalam Negeri pada 30 November, pembahasan Raperda APBD DKI 2020 selesai sesuai jadwal perpanjangan yang ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya, Raperda APBD diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk evaluasi selama 15 hari. Setelah proses evaluasi, Raperda APBD bisa disahkan menjadi Perda APBD.

(IRE/BOW)